

Judul : Pimpinan DPR Minta Anggota DPR Lakukan Perdebatan Substantif
Tanggal : Selasa, 16 April 2019
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Pimpinan DPR Minta Anggota DPR Lakukan Perdebatan Substantif



FOTO: DOK DPR

DEMI mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang lebih baik lagi, para pimpinan DPR-RI berharap penuh kepada anggota DPR-RI terpilih pada Pemilu 2019 di periode 2019-2024 untuk mampu menghadirkan perdebatan-perdebatan secara substantif.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengakui bahwa saat ini di parlemen belum secara maksimal dihadirkan perdebatan substantif. "Saya kira kita membutuhkan perdebatan. Sayang sekali kalau kita di DPR ini tak melakukan perdebatan substantif, saya kira ini persoalan," kata Fadli di ruangan Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/4).

Fadli menganggap perdebatan yang ada di DPR selama ini, masih cenderung di permukaan dan bersifat teknis sehingga wajar jika setiap pengambilan keputusan politik di DPR selalu berujung voting.

"Dalam perjalanan bangsa,

saya kira kita perlu perdebatan substantif dengan berbagai macam isu. Ini yang kita perlukan ke depan baik di dalam pemerintahan maupun parlemen," ujar Fadli.

Dia mengakui, dirinya dalam berdebat selalu mengeluarkan pemikiran yang substantif. Tiap pembahasan isu untuk diperdebatkan pun, tak jarang diakuinya keluar secara spontan. Namun, katanya ada juga yang disampaikan melalui riset mendalam.

Ketika menanggapi program DPR-RI terbuka yang kini sudah mulai berjalan, Fadli berharap bisa membuat lembaga wakil rakyat itu jauh lebih baik dari sebelumnya. "Oleh karena itu, dalam perjalanannya kita perlu sering melakukan perdebatan yang substantif dalam berbagai macam isu yang harus dilakukan parlemen ke depannya. Apalagi, semenjak adanya parlemen terbuka, saya berharap para anggota DPR-RI yang terpilih pada 17 April 2019 nanti, bisa membuat DPR-RI lebih berwarna,"

pungkas politikus Partai Gerindra itu.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah, memberikan apresiasi dan sependapat dengan pemikiran Fadli selaku koleganya di parlemen. "Tentunya maksud Fadli ini ialah agar perdebatan substantif selalu dilakukan setiap anggota DPR," ujar Fahri.

Hal itu diyakini dapat dilakukan sebab DPR-RI akan melakukan adaptasi amandemen konstitusi untuk konsep DPR-RI agar lebih baik lagi. "Kita telah menyiapkan 6 undang-undang (UU) baru agar memperbaiki DPR ke depan, 4 UU itu di antaranya agar dalam UU MD3 dipecah," paparnya.

UU MD3 ialah undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Selama ini, jelas Fahri, UU tentang DPR itu digabung dengan lembaga lain. Akibatnya,

dalam membaca dan menerjemahkan maksud dari UU menjadi kurang jelas. "Maka kita harus membuat UU untuk DPR sendiri, UU DPRD sendiri," ungkap Fahri.

UU lainnya, yaitu undang-undang lembaga perwakilan untuk mengatur keseluruhan konsep independensi lembaga perwakilan. Setelah anggota DPR terpilih, seharusnya dia mewakili suara rakyat. Karenanya, hubungan legislator dengan partai politik harus lebih independen dan tidak ada sabotase terhadap suara rakyat. "Dengan demikian, hubungan antara trias politika itu berjalan dengan baik," ucap Fahri.

UU yang keenam, lanjutnya, undang-undang sistem peradilan etika anggota DPR/ lembaga perwakilan. "Bila seorang anggota DPR terkena kasus dan harus dihukum, seperti di negara demokrasi yang maju, kasus mereka diselesaikan di internal terlebih dahulu, yaitu dipecat, baru diadili," ujarnya. (Try/S2-25)